

Pertumbuhan Ekonomi yang Bertimpang Antara Provinsi Jakarta dan Papua Barat 2024-2025

Athaya Javier Rakhasiwi¹⁾, Nabel Zaldi Pratama²⁾, Keisha Noor Fatima³⁾
Fahrezi Setiawan⁴⁾, Fadli Ahmad Ramadhan⁵⁾, Ahmad Setiawan Nuraya⁶⁾
^{1,2,3,4,5,6} Indonesia Banking School, Jakarta Selatan, Indonesia
e-mail: nabel.20241111069@ibs.ac.id

Article Information

Submit: 24-04-2025

Revised: 06-05-2026

Accepted: 31-05-2026

Abstrak

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024–2025 menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup signifikan antarwilayah, terutama antara Provinsi DKI Jakarta dan Papua Barat. Jakarta sebagai pusat pemerintahan, bisnis, dan investasi nasional mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dengan dukungan infrastruktur modern, tingkat konsumsi tinggi, serta akses teknologi yang luas. Sebaliknya, Papua Barat masih menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya kualitas sumber daya manusia, ketergantungan terhadap sektor primer, serta distribusi pembangunan yang belum merata. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur dari data Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, jurnal ilmiah, dan laporan ekonomi nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan perilaku ekonomi masyarakat, lingkungan geografis, kualitas pendidikan, investasi, serta kebijakan pembangunan menjadi faktor utama penyebab ketimpangan pertumbuhan ekonomi di kedua provinsi. Dalam perspektif teori makroekonomi, ketimpangan ini berkaitan dengan perbedaan produktivitas faktor produksi, perilaku konsumsi, dan efisiensi pasar tenaga kerja. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pembaca mengenai realitas ketimpangan ekonomi Indonesia sekaligus mendorong perhatian terhadap pentingnya pemerataan pembangunan nasional.

Kata Kunci: Pertumbuhan ekonomi, ketimpangan wilayah, Jakarta, Papua Barat, makroekonomi

Abstract

Indonesia's economic growth in 2024–2025 shows significant disparities between regions, particularly between the provinces of Jakarta and West Papua. Jakarta, as the center of government, business, and national investment, has experienced relatively stable economic growth supported by modern infrastructure, high consumption levels, and broad access to technology. In contrast, West Papua still faces various obstacles such as limited infrastructure, low quality human resources, dependence on the primary sector, and unequal distribution of development. This research uses a qualitative descriptive method with a literature review approach using data from the Central Statistics Agency (BPS), Bank Indonesia, scientific journals, and national economic reports. The results indicate that differences in economic behavior, geographic environment, educational quality, investment, and development policies are the main factors causing disparities in economic growth between the two provinces. From a macroeconomic perspective, this disparity is related to differences in productivity of production factors, consumption behavior, and labor market efficiency. This research is expected to increase readers' understanding of the reality of economic inequality in Indonesia and raise awareness of the importance of equitable national development.

Keywords: Economic growth, regional inequality, Jakarta, West Papua, macroeconomics

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan potensi sumber daya alam dan ekonomi yang besar. Namun, pertumbuhan ekonomi antarwilayah di Indonesia masih menunjukkan ketimpangan yang cukup tinggi. Ketimpangan tersebut terlihat jelas antara Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi nasional dengan Provinsi Papua Barat yang masih menghadapi berbagai keterbatasan pembangunan ekonomi. DKI Jakarta memiliki struktur ekonomi yang didominasi sektor jasa, perdagangan, keuangan, teknologi digital, dan industri modern yang memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Infrastruktur yang lengkap, tingginya investasi, serta konsentrasi kegiatan ekonomi menyebabkan pertumbuhan ekonomi Jakarta relatif stabil dan tinggi. Sebaliknya, perekonomian Papua Barat

masih bergantung pada sektor pertambangan dan sumber daya alam yang cenderung fluktuatif sehingga pertumbuhan ekonominya kurang stabil. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2024–2025), kontribusi PDRB per kapita Jakarta jauh lebih tinggi dibandingkan Papua Barat, yang menunjukkan adanya kesenjangan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dalam perspektif makroekonomi, pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat dianalisis melalui teori pertumbuhan ekonomi yang menekankan peran modal, tenaga kerja, teknologi, dan produktivitas. Menurut teori pertumbuhan Solow, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Wilayah yang memiliki investasi tinggi, infrastruktur memadai, dan teknologi modern akan mengalami pertumbuhan Produk Domestik Bruto (GDP/PDRB) yang lebih cepat dibandingkan wilayah yang masih terbatas dalam akses modal dan teknologi.

Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional memiliki tingkat investasi domestik dan asing yang tinggi sehingga mampu meningkatkan kapasitas produksi dan pendapatan daerah. Selain itu, konsentrasi industri dan jasa modern mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja dan konsumsi masyarakat. Sebaliknya, Papua Barat masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta tingginya biaya distribusi akibat kondisi geografis yang sulit dijangkau. Faktor tersebut menyebabkan pertumbuhan output ekonomi berjalan lebih lambat. Menurut teori pertumbuhan endogen, kemajuan pendidikan, inovasi, dan teknologi menjadi faktor utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Jakarta memiliki akses pendidikan, teknologi informasi, dan ekonomi digital yang lebih maju dibandingkan Papua Barat. Perbedaan kualitas sumber daya manusia ini memengaruhi produktivitas dan kemampuan daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, faktor distribusi pembangunan nasional juga memengaruhi ketimpangan ekonomi antarwilayah. Aktivitas ekonomi nasional lebih terpusat di Pulau Jawa, khususnya Jakarta, sehingga arus investasi, pembangunan infrastruktur, dan kesempatan kerja lebih banyak terkonsentrasi di wilayah tersebut. Menurut Todaro dan Smith (2021), ketimpangan wilayah di negara berkembang terjadi karena pembangunan ekonomi cenderung terpusat pada daerah yang memiliki akses pasar, modal, dan teknologi lebih baik. Faktor geografis juga menjadi hambatan pertumbuhan ekonomi Papua Barat. Kondisi wilayah yang bergunung dan tersebar menyebabkan biaya logistik dan pembangunan infrastruktur menjadi lebih mahal dibandingkan Jakarta. Menurut Bank Indonesia (2024), tingginya biaya logistik di kawasan timur Indonesia menghambat distribusi barang, investasi, dan pertumbuhan sektor industri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan pertumbuhan ekonomi antara Provinsi DKI Jakarta dan Papua Barat pada periode 2024–2025 berdasarkan perspektif makroekonomi dengan menggunakan teori pertumbuhan ekonomi dan indikator GDP/PDRB. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah serta pentingnya kebijakan pembangunan yang lebih merata di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menjelaskan fenomena ketimpangan pertumbuhan ekonomi antara Provinsi DKI Jakarta dan Papua Barat pada periode 2024–2025. Metode ini dipilih karena mampu menggambarkan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat secara lebih mendalam. Menurut Sugiyono (2022), metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan fenomena secara sistematis dan faktual berdasarkan data yang diperoleh. Pendekatan kualitatif digunakan karena ketimpangan ekonomi tidak hanya dapat dijelaskan melalui angka statistik, tetapi juga dipengaruhi oleh perilaku masyarakat, kualitas infrastruktur, pendidikan, serta kondisi geografis wilayah. Penelitian ini bertujuan memahami penyebab dan dampak ketimpangan ekonomi antarwilayah berdasarkan perspektif mikroekonomi

dan kondisi sosial masyarakat.

Sumber Data

Penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber terpercaya, yaitu:

1. Badan Pusat Statistik (BPS) untuk data pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, dan investasi.
2. Bank Indonesia (BI) untuk data kondisi ekonomi nasional dan perkembangan investasi.
3. Jurnal ekonomi nasional dan internasional sebagai landasan teori.
4. Artikel ilmiah dan laporan pembangunan daerah.
5. Berita ekonomi terpercaya tahun 2024–2025.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur (library research) dengan mengumpulkan dan menganalisis buku, jurnal ilmiah, laporan pemerintah, data statistik, artikel penelitian, dan berita ekonomi. Referensi dipilih berdasarkan relevansi dan publikasi terbaru agar data tetap aktual.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui beberapa tahapan:

1. Mengumpulkan data dari berbagai sumber.
2. Mengelompokkan data berdasarkan tema penelitian.
3. Membandingkan kondisi ekonomi Jakarta dan Papua Barat.
4. Menafsirkan data berdasarkan teori mikroekonomi.
5. Menarik kesimpulan mengenai penyebab dan dampak ketimpangan ekonomi.

Analisis difokuskan pada beberapa aspek utama, yaitu:

- a. Infrastruktur
- b. Perilaku masyarakat
- c. Investasi
- d. Pendidikan
- e. Lingkungan geografis
- f. Produktivitas ekonomi

Melalui analisis tersebut, penelitian ini berusaha menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan pertumbuhan ekonomi antara DKI Jakarta dan Papua Barat serta dampaknya terhadap masyarakat di kedua wilayah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Pertumbuhan Ekonomi Jakarta dan Papua Barat

Provinsi DKI Jakarta merupakan pusat perekonomian nasional yang memiliki kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Sebagai ibu kota negara dan pusat bisnis nasional, Jakarta berkembang menjadi wilayah dengan aktivitas ekonomi yang berlangsung hampir selama 24 jam. Tingginya aktivitas perdagangan, jasa keuangan, teknologi digital, transportasi, hingga industri kreatif membuat Jakarta menjadi daerah dengan tingkat perputaran uang yang sangat tinggi. Infrastruktur modern seperti MRT, LRT, jalan tol, pusat perbelanjaan, serta akses internet cepat mendorong efisiensi kegiatan ekonomi masyarakat (Kementerian Keuangan RI, 2024).

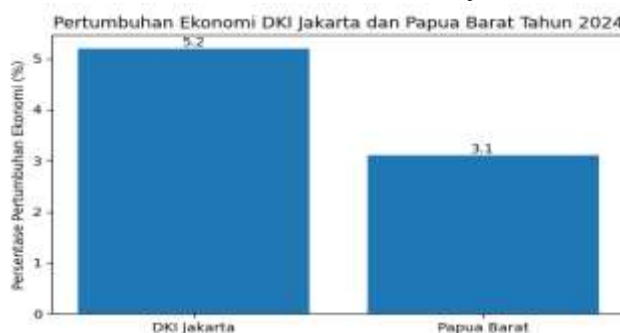
Pertumbuhan ekonomi Jakarta pada tahun 2024–2025 juga didukung oleh tingginya tingkat konsumsi masyarakat perkotaan. Masyarakat Jakarta memiliki pola konsumsi modern yang

cenderung aktif terhadap penggunaan teknologi digital, layanan e-commerce, transaksi non-tunai, dan gaya hidup konsumtif. Dalam perspektif mikroekonomi, tingginya konsumsi masyarakat meningkatkan permintaan barang dan jasa sehingga mendorong pertumbuhan sektor usaha (Samuelson & Nordhaus, 2021). Selain itu, Jakarta menjadi pusat investasi nasional karena dianggap memiliki risiko bisnis yang lebih rendah dibandingkan daerah lain. Banyak perusahaan besar nasional maupun internasional memilih membuka kantor pusat di Jakarta karena akses pasar yang luas, tenaga kerja profesional, serta dukungan infrastruktur yang lengkap. Kondisi ini menciptakan lapangan pekerjaan lebih banyak dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Berbeda dengan Jakarta, Papua Barat masih menghadapi tantangan pembangunan yang cukup kompleks. Kondisi geografis yang berbukit, bergunung-gunung, dan wilayah yang tersebar menyebabkan pembangunan infrastruktur menjadi lebih sulit dan mahal. Banyak daerah di Papua Barat yang masih sulit dijangkau transportasi darat sehingga distribusi barang dan jasa membutuhkan biaya tinggi (Bappenas, 2023). Keterbatasan infrastruktur tersebut menyebabkan aktivitas ekonomi masyarakat Papua Barat berkembang lebih lambat dibandingkan Jakarta. Sebagian besar masyarakat masih bergantung pada sektor primer seperti pertanian, perikanan, kehutanan, dan pertambangan. Ketergantungan terhadap sektor sumber daya alam membuat pertumbuhan ekonomi Papua Barat sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas dunia (Asian Development Bank, 2025).

Selain faktor geografis, tingkat urbanisasi dan perkembangan teknologi di Papua Barat juga masih relatif rendah. Akses internet dan digitalisasi ekonomi belum merata sehingga pelaku usaha lokal mengalami keterbatasan dalam mengembangkan pasar. Akibatnya, produktivitas ekonomi masyarakat belum berkembang secara optimal. Fenomena ini memperlihatkan adanya ketimpangan pembangunan antarwilayah di Indonesia, di mana pertumbuhan ekonomi lebih terkonsentrasi di wilayah perkotaan seperti Jakarta dibandingkan kawasan timur Indonesia seperti Papua Barat. Perbedaan pertumbuhan ekonomi antara DKI Jakarta dan Papua Barat pada tahun 2024–2025 dapat dilihat pada Grafik 1 dan 2 berikut.

Grafik 1. Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta dan Papua Barat Tahun 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2024. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Data Provinsi Tahun 2024.

Link: <https://www.bps.go.id>

Grafik menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada tahun 2024 mencapai sekitar 5,2%, lebih tinggi dibandingkan Papua Barat yang berada pada angka 3,1%. Tingginya pertumbuhan ekonomi Jakarta dipengaruhi oleh perkembangan sektor jasa, perdagangan, teknologi digital, dan investasi yang terus meningkat. Selain itu, infrastruktur yang lengkap serta tingginya aktivitas konsumsi masyarakat perkotaan turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil. Sementara itu, Papua Barat mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah karena masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, akses pendidikan, dan

ketergantungan terhadap sektor primer seperti pertambangan dan hasil alam. Kondisi geografis yang sulit dijangkau juga menyebabkan biaya distribusi dan pembangunan menjadi lebih tinggi dibandingkan Jakarta.

Grafik 2. Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta dan Papua Barat Tahun 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta dan Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat, 2025. Jakarta Dalam Angka 2025 dan Papua Barat Dalam Angka 2025.

Link: <https://jakarta.bps.go.id>

Grafik menunjukkan bahwa pada tahun 2025 pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta meningkat menjadi sekitar 5,4%, sedangkan Papua Barat mencapai sekitar 3,4%. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Jakarta didukung oleh perkembangan ekonomi digital, sektor jasa, perdagangan, dan meningkatnya investasi nasional maupun internasional. Infrastruktur modern dan tingginya daya beli masyarakat membuat aktivitas ekonomi di Jakarta berkembang lebih cepat dan stabil. Di sisi lain, Papua Barat juga mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi masih berada di bawah Jakarta. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kualitas sumber daya manusia, rendahnya akses teknologi, serta ketergantungan terhadap sektor sumber daya alam yang cenderung fluktuatif mengikuti harga komoditas dunia. Perbedaan pertumbuhan ekonomi kedua wilayah menunjukkan bahwa pembangunan nasional masih belum merata dan masih terpusat di wilayah perkotaan serta pusat bisnis nasional seperti Jakarta.

Penyebab Ketimpangan Ekonomi

a. Infrastruktur yang Tidak Merata

Salah satu penyebab utama ketimpangan ekonomi antara Jakarta dan Papua Barat adalah perbedaan kualitas infrastruktur. Jakarta memiliki infrastruktur yang sangat modern dan terintegrasi, mulai dari transportasi publik, pusat bisnis, jaringan internet, hingga fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai. Infrastruktur tersebut meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa serta mempercepat mobilitas masyarakat (*World Bank, 2022*).

Keberadaan MRT, LRT, jalan tol, pelabuhan modern, dan bandara internasional membuat aktivitas ekonomi di Jakarta berlangsung lebih cepat dan efisien. Infrastruktur digital yang maju juga mendorong berkembangnya sektor startup, financial technology, dan ekonomi kreatif.

Sebaliknya, Papua Barat masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, jaringan telekomunikasi, dan transportasi. Banyak wilayah pedalaman yang belum memiliki akses jalan memadai sehingga distribusi logistik membutuhkan biaya tinggi. Dalam teori ekonomi mikro, tingginya biaya distribusi akan meningkatkan biaya produksi sehingga harga barang menjadi lebih mahal (Case & Fair, 2020). Kondisi ini menyebabkan investor lebih memilih menanamkan modal di wilayah yang memiliki infrastruktur lengkap seperti Jakarta dibandingkan Papua Barat. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi di Papua Barat berjalan lebih lambat.

b. Perbedaan Kualitas Sumber Daya Manusia

Perbedaan kualitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penting dalam ketimpangan ekonomi kedua wilayah. Jakarta memiliki akses pendidikan yang lebih baik dibandingkan Papua Barat. Banyak universitas ternama, lembaga pelatihan kerja, dan pusat pengembangan teknologi berada di Jakarta sehingga menghasilkan tenaga kerja yang kompetitif dan terampil (UNDP Indonesia, 2023). Perusahaan besar cenderung memilih Jakarta sebagai pusat operasional karena tersedia tenaga kerja profesional yang mampu mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan industri modern. Tingkat pendidikan yang tinggi juga meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan inovasi ekonomi.

Sebaliknya, beberapa wilayah di Papua Barat masih mengalami keterbatasan akses pendidikan, terutama di daerah pedalaman. Keterbatasan fasilitas sekolah, tenaga pengajar, dan akses teknologi menyebabkan kualitas sumber daya manusia berkembang lebih lambat. Akibatnya, daya saing tenaga kerja Papua Barat dalam pasar nasional menjadi lebih rendah. Dalam teori human capital, kualitas pendidikan dan keterampilan merupakan investasi penting yang dapat meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat (Becker, 2021). Oleh karena itu, rendahnya kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu penyebab utama lambatnya pertumbuhan ekonomi Papua Barat.

c. Ketergantungan terhadap Sektor Primer

Perekonomian Papua Barat masih didominasi oleh sektor primer seperti pertambangan, migas, kehutanan, dan hasil alam lainnya. Ketergantungan terhadap sektor tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi Papua Barat sangat dipengaruhi oleh harga komoditas global. Ketika harga komoditas dunia meningkat, ekonomi daerah ikut tumbuh. Namun ketika harga turun, pertumbuhan ekonomi menjadi melambat (International Monetary Fund, 2024). Sementara itu, Jakarta memiliki struktur ekonomi yang lebih beragam dan modern. Aktivitas ekonomi Jakarta lebih didominasi sektor jasa, perdagangan, teknologi, dan industri kreatif yang memiliki nilai tambah tinggi. Diversifikasi ekonomi tersebut membuat Jakarta lebih stabil dalam menghadapi perubahan ekonomi global. Dalam teori mikroekonomi, daerah yang memiliki diversifikasi sektor usaha cenderung lebih stabil karena tidak bergantung pada satu sumber pendapatan saja (Pindyck & Rubinfeld, 2022). Hal inilah yang membuat Jakarta memiliki ketahanan ekonomi lebih baik dibandingkan Papua Barat.

d. Perilaku Konsumen dan Pasar

Perilaku konsumen juga memengaruhi perbedaan pertumbuhan ekonomi kedua wilayah. Masyarakat Jakarta memiliki daya beli yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat Papua Barat. Tingginya pendapatan masyarakat Jakarta menyebabkan permintaan terhadap barang dan jasa terus meningkat. Dalam teori permintaan, peningkatan daya beli masyarakat akan meningkatkan konsumsi sehingga aktivitas ekonomi menjadi lebih aktif (Krugman & Wells, 2021). Hal ini terlihat dari berkembangnya pusat perbelanjaan, layanan digital, bisnis kuliner, dan sektor hiburan di Jakarta.

Sebaliknya, sebagian masyarakat Papua Barat masih memiliki pendapatan relatif rendah sehingga pola konsumsi masyarakat lebih berfokus pada kebutuhan dasar. Akibatnya, permintaan pasar berkembang lebih lambat dan investor kurang tertarik melakukan ekspansi usaha di wilayah tersebut. Selain itu, budaya konsumsi modern di Jakarta juga mendorong pertumbuhan ekonomi digital seperti marketplace, layanan transportasi daring, dan transaksi elektronik. Papua Barat masih menghadapi keterbatasan akses teknologi sehingga perkembangan ekonomi digital belum berjalan optimal.

Analisis Makroekonomi terhadap Ketimpangan Pertumbuhan Ekonomi

a. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Dalam perspektif makroekonomi, pertumbuhan ekonomi suatu daerah diukur melalui peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau GDP. Teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan bahwa pertumbuhan dipengaruhi oleh akumulasi modal, tenaga kerja, teknologi, investasi, dan produktivitas ekonomi. Menurut teori pertumbuhan Solow, daerah yang memiliki tingkat investasi tinggi, teknologi modern, dan infrastruktur memadai akan mengalami pertumbuhan ekonomi lebih cepat dibandingkan daerah yang memiliki keterbatasan modal dan teknologi. DKI Jakarta memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi karena didukung oleh:

1. Tingginya investasi domestik dan asing
2. Infrastruktur modern dan lengkap
3. Konsentrasi sektor jasa dan perdagangan
4. Teknologi dan digitalisasi ekonomi yang maju
5. Produktivitas tenaga kerja yang tinggi

Keunggulan tersebut menyebabkan nilai PDRB Jakarta jauh lebih besar dibandingkan Papua Barat. Aktivitas ekonomi di Jakarta juga lebih beragam sehingga mampu menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi meskipun terjadi perubahan kondisi global (Mankiw, 2022).

Sebaliknya, Papua Barat masih bergantung pada sektor pertambangan dan sumber daya alam yang bersifat fluktuatif. Ketergantungan terhadap sektor primer menyebabkan pertumbuhan ekonomi daerah lebih rentan terhadap perubahan harga komoditas dunia. Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan rendahnya kualitas sumber daya manusia menyebabkan produktivitas ekonomi Papua Barat berkembang lebih lambat.

b. Teori Investasi dan Akumulasi Modal

Dalam teori Harrod-Domar, pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh tingkat tabungan dan investasi. Semakin tinggi investasi yang masuk ke suatu wilayah, semakin besar kemampuan daerah tersebut meningkatkan kapasitas produksi dan GDP. Jakarta menjadi pusat investasi nasional karena memiliki akses pasar luas, fasilitas bisnis lengkap, dan risiko investasi yang relatif rendah. Kondisi tersebut mendorong pertumbuhan industri, jasa keuangan, perdagangan, dan sektor digital yang memberikan kontribusi besar terhadap PDRB daerah. Sementara itu, Papua Barat menghadapi keterbatasan investasi akibat kondisi geografis yang sulit, biaya logistik tinggi, dan infrastruktur yang belum merata. Akibatnya, pembangunan sektor industri dan jasa berkembang lebih lambat sehingga pertumbuhan GDP daerah tidak secepat Jakarta (Bank Indonesia, 2024).

c. Ketimpangan Struktur Ekonomi Daerah

Struktur ekonomi Jakarta didominasi sektor tersier seperti jasa, keuangan, teknologi informasi, dan perdagangan modern yang memiliki nilai tambah tinggi. Sektor-sektor tersebut mampu menciptakan pendapatan besar dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Sebaliknya, struktur ekonomi Papua Barat masih didominasi sektor primer seperti pertambangan, pertanian, dan perikanan. Sektor primer cenderung memiliki nilai tambah lebih rendah dan sangat dipengaruhi kondisi alam serta harga komoditas global. Perbedaan struktur ekonomi ini menyebabkan ketimpangan kontribusi GDP antarwilayah semakin besar (Todaro & Smith, 2021).

d. Teori Ketimpangan Pembangunan Wilayah

Menurut teori ketimpangan regional, pembangunan ekonomi cenderung terpusat pada

wilayah yang memiliki akses modal, teknologi, tenaga kerja terampil, dan pasar yang lebih baik. Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi nasional memperoleh lebih banyak pembangunan infrastruktur, investasi, dan fasilitas publik dibandingkan Papua Barat. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi nasional lebih terkonsentrasi di wilayah barat Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Sementara itu, kawasan timur Indonesia masih mengalami keterbatasan pembangunan sehingga pertumbuhan GDP daerah berlangsung lebih lambat.

Dampak Ketimpangan Pertumbuhan Ekonomi

Ketimpangan pertumbuhan ekonomi antara Jakarta dan Papua Barat menimbulkan berbagai dampak makroekonomi, antara lain:

1. Ketimpangan pendapatan antarwilayah
2. Urbanisasi tinggi menuju Jakarta
3. Konsentrasi investasi di Pulau Jawa
4. Tingginya tingkat pengangguran di daerah tertinggal
5. Kesenjangan pembangunan pendidikan dan kesehatan
6. Ketidakmerataan kontribusi GDP nasional

Urbanisasi yang tinggi menyebabkan Jakarta mengalami kepadatan penduduk, kemacetan, dan peningkatan kebutuhan infrastruktur perkotaan. Sebaliknya, Papua Barat mengalami keterbatasan tenaga kerja produktif karena sebagian masyarakat berpindah ke kota besar untuk mencari pekerjaan (OECD, 2023). Jika ketimpangan ini terus berlangsung, maka pemerataan pembangunan nasional akan semakin sulit tercapai dan dapat memengaruhi stabilitas ekonomi nasional.

Solusi dan Strategi Pemerataan Ekonomi

a. Peningkatan Infrastruktur di Papua Barat

Pemerintah perlu mempercepat pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, listrik, dan internet untuk menurunkan biaya logistik dan meningkatkan aktivitas ekonomi daerah.

b. Meningkatkan Investasi Daerah

Pemberian insentif pajak dan kemudahan investasi dapat menarik investor untuk mengembangkan industri dan sektor jasa di Papua Barat.

c. Diversifikasi Struktur Ekonomi

Papua Barat perlu mengembangkan sektor ekonomi nonpertambangan seperti pariwisata, perikanan modern, industri kreatif, dan UMKM agar pertumbuhan ekonomi lebih stabil.

d. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Pendidikan dan pelatihan kerja penting dilakukan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan memperkuat daya saing ekonomi daerah.

e. Pemerataan Kebijakan Pembangunan Nasional

Pemerintah perlu mendorong distribusi pembangunan yang lebih merata agar pertumbuhan GDP nasional tidak hanya terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa. Pemerataan pembangunan ekonomi tidak berarti menyamakan seluruh daerah, melainkan menciptakan kesempatan pertumbuhan yang lebih adil agar setiap wilayah dapat berkembang sesuai potensi ekonomi yang dimiliki.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi antara Provinsi DKI Jakarta dan Papua Barat pada periode 2024–2025 menunjukkan ketimpangan yang cukup signifikan. DKI Jakarta mencatat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan stabil, yaitu sekitar 5,2% pada tahun 2024 dan meningkat menjadi 5,4% pada tahun 2025. Pertumbuhan

tersebut didukung oleh struktur ekonomi yang modern dan terdiversifikasi, dominasi sektor jasa dan perdagangan, tingginya investasi domestik maupun asing, infrastruktur yang lengkap, serta kualitas sumber daya manusia yang lebih unggul. Selain itu, tingginya daya beli masyarakat, perkembangan ekonomi digital, dan efisiensi distribusi barang dan jasa turut memperkuat posisi Jakarta sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional.

Di sisi lain, Papua Barat mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih rendah, yaitu sekitar 3,1% pada tahun 2024 dan 3,4% pada tahun 2025. Meskipun menunjukkan tren positif, laju pertumbuhan tersebut masih tertinggal dibandingkan Jakarta. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan infrastruktur, kondisi geografis yang sulit dijangkau, rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan akses pendidikan dan teknologi, serta ketergantungan yang tinggi terhadap sektor primer seperti pertambangan, kehutanan, dan perikanan. Struktur ekonomi yang kurang terdiversifikasi menyebabkan Papua Barat lebih rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global.

Dalam perspektif teori makroekonomi, ketimpangan pertumbuhan ekonomi ini sejalan dengan teori pertumbuhan Solow, teori Harrod-Domar, teori modal manusia (human capital), dan teori ketimpangan regional. Wilayah yang memiliki akumulasi modal lebih besar, produktivitas tinggi, teknologi maju, dan sumber daya manusia berkualitas akan tumbuh lebih cepat dibandingkan wilayah yang masih mengalami keterbatasan faktor-faktor tersebut. Oleh karena itu, ketimpangan antara Jakarta dan Papua Barat tidak hanya dipengaruhi oleh perbedaan angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh ketidakseimbangan dalam distribusi pembangunan nasional.

Ketimpangan pertumbuhan ekonomi ini menimbulkan berbagai dampak, seperti kesenjangan pendapatan antarwilayah, urbanisasi menuju kota besar, konsentrasi investasi di Pulau Jawa, keterbatasan lapangan kerja di daerah tertinggal, dan belum meratanya akses pendidikan serta layanan kesehatan. Apabila kondisi ini tidak segera diatasi, maka tujuan pembangunan nasional yang berkeadilan dan inklusif akan sulit tercapai. Dengan demikian, pemerataan pembangunan antarwilayah merupakan langkah strategis untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih seimbang dan berkelanjutan di Indonesia.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di Papua Barat, seperti jalan, pelabuhan, bandara, listrik, jaringan internet, dan fasilitas logistik. Infrastruktur yang memadai akan menurunkan biaya distribusi, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang usaha. Dengan infrastruktur yang lebih baik, daya tarik investasi di Papua Barat juga akan meningkat.

Pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perluasan akses pendidikan, pelatihan vokasi, pengembangan keterampilan digital, dan peningkatan kualitas tenaga pendidik. Program beasiswa, pembangunan sekolah di daerah terpencil, dan pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri perlu diperkuat agar masyarakat Papua Barat memiliki daya saing yang lebih tinggi dan mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi daerah.

Selain itu, diversifikasi struktur ekonomi Papua Barat harus menjadi prioritas. Pemerintah daerah perlu mendorong pengembangan sektor-sektor potensial seperti pariwisata, perikanan modern, pertanian berkelanjutan, industri kreatif, dan UMKM. Dengan memperluas basis ekonomi di luar sektor pertambangan, pertumbuhan ekonomi daerah akan menjadi lebih stabil dan tidak terlalu bergantung pada perubahan harga komoditas global. Pemerintah pusat juga disarankan memberikan insentif investasi, kemudahan perizinan, serta kebijakan fiskal yang

mendukung pengembangan usaha di wilayah timur Indonesia. Distribusi investasi yang lebih merata akan membantu mengurangi konsentrasi kegiatan ekonomi di Jakarta dan Pulau Jawa. Di samping itu, kebijakan pembangunan nasional perlu dirancang secara lebih inklusif dengan mempertimbangkan kondisi geografis, sosial, dan budaya daerah agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank, A. D. (2025). *Indonesia Development Outlook 2025*. ADB. <https://www.adb.org/countries/indonesia/main>
- Bank, W. (2024). *Indonesia Economic Prospects: Toward Inclusive Growth*. World Bank. <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/indonesia-economic-prospects>
- Bappenas. (2023). *Laporan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia*. Bappenas. <https://www.bappenas.go.id>
- Barat, B. P. S. P. P. (2025). *Papua Barat Dalam Angka 2025*. BPS Papua Barat. <https://papuabarat.bps.go.id>
- Becker, G. S. (2021). *Human Capital Theory*. University of Chicago Press. <https://press.uchicago.edu>
- Boediono. (2021). *Ekonomi Mikro*. BPFE. <https://opac.perpusnas.go.id>
- Case, K. E., & Fair, R. C. (2020). *Principles of Economics*. Pearson Education. <https://www.pearson.com>
- Fund, I. M. (2024). *Indonesia Regional Economic Report*. IMF. <https://www.imf.org>
- Indonesia, B. (2024). *Laporan Perekonomian Indonesia 2024*. Bank Indonesia. https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/LPI_2024.aspx
- Indonesia, K. K. R. (2024). *APBN dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional*. Kemenkeu RI. <https://www.kemenkeu.go.id>
- Indonesia, U. (2023). *Human Development Report Indonesia*. UNDP Indonesia. <https://www.id.undp.org>
- Jakarta, B. P. S. P. D. K. I. (2025). *DKI Jakarta Dalam Angka 2025*. BPS DKI Jakarta. <https://jakarta.bps.go.id>
- Jhingan, M. L. (2021). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Rajawali Pers. <https://opac.perpusnas.go.id>
- Krugman, P., & Wells, R. (2021). *Microeconomics*. Worth Publishers. <https://www.macmillanlearning.com>
- Kuncoro, M. (2022). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. UPP STIM YKPN. <https://onesearch.id>
- Mankiw, N. G. (2021). *Principles of Economics* (9 (ed.)). Cengage Learning.
- Nicholson, W., & Snyder, C. (2021). *Microeconomic Theory*. Cengage Learning. <https://www.cengage.com>
- OECD. (2023). *Regional Development in Indonesia*. OECD Publishing. <https://www.oecd.org>
- Pindyck, R. S., & Rubinfeld, D. L. (2022). *Microeconomics*. Pearson Education. <https://www.pearson.com>
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2021). *Economics*. McGraw-Hill Education. <https://www.mheducation.com>
- Statistik, B. P. (2024). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Trivulan IV-2024*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id>
- Stiglitz, J. E. (2020). *Economics of the Public Sector*. W.W. Norton & Company. <https://wwnorton.com>



- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. <https://onesearch.id>
- Sukirno, S. (2022). *Mikroekonomi Teori Pengantar*. Rajawali Pers. <https://opac.perpusnas.go.id>
- Tambunan, T. (2023). *Perekonomian Indonesia dan Ketimpangan Wilayah*. Ghalia Indonesia. <https://onesearch.id>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2021). *Economic Development*. Pearson Education. <https://www.pearson.com>
- Yusuf, A. A., & Sumner, A. (2023). Ketimpangan Ekonomi dan Pembangunan Wilayah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*, 24(2). <https://jepi.fe.ui.ac.id>